



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

NAMA : S U N A R D I, SP.MP
NIP : NIP. 19651201 198903 1 012
PANGKAT : PEMBINA
GOLONGAN : IV/a
JABATAN : Plt. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

A.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Kedudukan

- Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A.2 Tugas Pokok

- Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat Negara dan tamu negara;
- pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan

- pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.3 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, danperlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, danperlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- Penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A.4 Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya sedapat mungkin mengedepankan pendekatan persuasif, dan menggunakan pendekatan represif/upaya paksa apabila diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan dilapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

A.5 Kerjasama dan Koordinasi

- Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya.
- Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya, bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- Kerjasama sebagaimana, didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

B. ISU STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, antara lain :

1. Belum adanya relawan petugas penanganan kebakaran
2. Minimnya Sarana dan prasarana terkait penanganan kebakaran dan non kebakaran
3. belum terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran
4. Terbatasnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Perda/Perkada

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan yaitu “ ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat***“

B. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sasaran adalah Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan

kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada beberapa masalah utama yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, terbatasnya sumber daya aparatur dan sarana sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya roda Pemerintahan yang selama ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja yang bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan. Atas dasar arti dan makna strategi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 5 (lima) Tahun kedepan (2018 – 2023) ditetapkan strategi berupa kebijakan umum, untuk selanjutnya target sasaran dan tujuan bisa kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum		Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	80.1	76	83,6	82,63	83	83,5
	Mingkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Presentase Penegakan Perda / Perkada	100%	100%	100%	85%	85%	85%
		Presentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : 1. Tingkat Waktu Tanggap 15 Menit	100%	94,59%	100%	35%	40%	75%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan capaian kinerja sebagai berikut :

A.2 Capaian Kinerja Tujuan

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83	79,12	95,32%	Penilaian dari bagian organisasi

A.3 Capaian Kinerja Sasaran:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam		Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83	79,12	95,32	Sisa capaian kinerja pada tribulan berikutnya
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penegakan Perda/Perkada	85	81	95,29	Sisa capaian kinerja pada tribulan berikutnya
		Perentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan: Tingkat Waktu Tanggap 15 Menit	75	82	109,2	Tercapai

Keterangan:**Indikator I**

Persentase Penegakan Perda/Perkada, formulasi penghitungannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda/Perkada pada tahun N}} \times 100\%$$

Untuk menghitung/menjabarkan formulasi indikator diatas dasar penghitungannya adalah diambil dari data pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2023. Adapun data pelanggaran dimaksud pada tabel data pelanggaran Perda/Perkada berikut ini:

Tabel 3.3
Data Pelanggaran Perda/Perkada
Tribulan I Tahun 2023

No	Jenis Penertiban	Nomor Perda dan Perkada	Penertiban	
			Jumlah Kegiatan Penertiban	Jumlah Pelanggaran
1	Penyelenggaraan Jalan	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 08 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Jalan	1	1
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 08 Tahun 2012 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	1
3	Perda Lumajang Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Pajak Pemotongan Hewan	Peraturan Daerah Lumajang Nomor 12 Tahun 1981 T - Pajak Pemotongan Hewan	1	1
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 13 Tahun 1995 - Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Daerah	180	10
5	Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 6 Tahun 2020 - Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi	5	13
6	Penertiban dan pembinaan Pedagang kaki Lima (PKL)	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2006 - Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang	180	159
7	Restribusi Ijin mendirikan bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2006 - Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang	1	1
8	tambang ilegal	Perda no 18 Tahun 2006 - surat ijin pertambangan daerah	1	1
9	Pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten Lumajang	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2009 - Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang	1	1
10	Pajak mineral batuan dan logam	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	1

11	Penyelenggaraan Reklame	Peraturan bupati Lumajang No.54 Tahun 2016 - Penyelenggaraan Reklame	25	193
12	Tempat Penimbunan (Stockpile) Terpadu	Peratura Bupati Lumajang No.40 Tahun 2022 - Tempat penimbunan pasir (stokcpile) terpadu	180	1
	Total Pelanggaran			383

Dari table di atas maka Persentase Penegakan Perda/Perkada adalah:

$$= \frac{311 \text{ kasus pelanggaran yang diselesaikan sampai Tribulan ITahun 2023}}{383 \text{ kasus pelanggaran sampai Tribulan ITahun 2023}} \times 100\%$$

$$= 81 \%$$

Analisa capain kinerja:

Jumlah pelanggaran pada tribulan I Tahun 2023 sebanyak 383 pelanggaran dengan kasus pelanggaran yang diselesaikan 311 kasus sehingga presentase Penegakan Perda/Perkada pada tribulan ITahun 2023 sebesar 81 %, capaian kinerja sebesar 95 %

Adapun penyebab tingginya kasus pelanggaran yaitu

1. Minimnya pemamahaman masyarakat terkait Perda/Perkada
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam kegiatan penegakan perda/perkada
3. Minimnya jumlah SDM dalam kegiatan penegakan perda/perkada
4. Minimnya pemahaman masyarakat terkait perda/perkada

Indikator II

Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) perhitungan formulanya adalah

$$\frac{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate pada tahun N)}}{\text{Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N}} \times 100$$

Penjelasan :

Tingkat Waktu tanggap (*Respon Time Rate*) 15 Menit/Permendagri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standart Tekhnis Pelayanan Dasar Pada Standart Peleyanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud adalah dari menerima pengaduan kejadian kebakaran sampai petugas pemadam tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKB) waktunya 15 menit, untuk selanjutnya data response time rate s/d Tribulan I Tahun 2023 bisa kita lihat pada table berikut ini:

Tabel. 3.4
Data Penanganan Penanggulangan bencana Kebakaran
Tribulan I Tahun 2023

No	Bulan	Respon Time	Tidak Respon Time	Jumlah Kebakaran
1	Januari	2	1	3
2	Februari	1	1	2
3	Maret	6	0	6
	Jumlah	9	2	11

Dari tabel diatas Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) bisa dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{9 \text{ kejadian kebakaran yang sesuai respon time}}{11 \text{ kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

$$= 81,81 \%$$

Maka capaian Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) pada tribulan ITahun 2023 realisasi sebesar 81,81 % dengan capaian kinerja sebesar 70% dengan capaian kinerja sebesar 109,08%

Adapun penyebab terjadinya tidak tercapainya respon time rate penanganan kebakaran adalah:

1. Belum terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran (MWK)
2. Belum terbentuknya relawan terhadap penanganan kebakaran
3. Kurangnya jumlah personil
4. Minimnya sarana dan prasarana

Tabel 3.5
Pemenuhan Capaian Sasaran Dengan Tahun Sebeumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada	117,60%	87,88%	61,43%			17,27%	24,57%	37,63%			14,69%	27,96%	61,26%		
		Presentase Pelanggaran Masyarakat yang di Tindaklanjuti oleh Linmas	60%	68,75%	73%			100%	100%	100%			166,67%	145,45%	136,99%		
		Persentase Penegakan Perda/Perkada				85%	85%				83%	20%				98%	81%
		Presentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate)	25%	30%	35%	100%	75%	94,59%	100%	100%	70%	82%	378,36%	333,33%	285,71%	70%	109%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Daerah Wilayah Menege men Kebakar an (WMK) dalam kota 15 menit															

Tabel 3.6
Data Realisasi Sasaran Program dan Anggaran
Tribulan I Tahun 2023

No	Program	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Tribulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tribulan I 2023	
			4		5		6	
	2	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100	% 5.545.947.133	23	% 1.126.515.823	23%	20%
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	% 10.657.462.963	47	unit 976.342.000	47%	9%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100	% 750.404.252	100	laporan 189.932.000	100%	25%

B. REALISASI ANGGARAN

Berikut adalah program / kegiatan yang telah mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja, sebagai berikut :

B.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Tribulan I:

Tabel 3.7
Data Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja Tribulan I Tahun 2023 Pada			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tribulan I Tahun 2023		
			4		5	6					
1	2	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100	%	5.545.947.133	23	%	1.126.515.823	23	%	20%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	%	13.736.000	29	%	720.000	29	%	5%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	12.140.000	1	dokumen	-	50	dokumen	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	1.596.000	1	laporan	720.000	20	laporan	45%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan	100	%	4.151.810.008	21	%	772.456.284	21	%	19%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja Tribulan I Tahun 2023 Pada			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tribulan I Tahun 2023		
			4			5			6		
			K	Rp		K	Rp		K	Rp	
		Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36/12	orang/bulan	4.081.650.008	12	orang/bulan	761.129.284	25	orang/bulan	19%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	65.776.000	3	dokumen	11.327.000	25	dokumen	17%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	2.600.000	0	laporan	-	0	laporan	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	laporan	1.784.000	4	laporan	-	22	laporan	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100	%	174.532.719	17	%	86.933.600	17	%	50%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	paket	10.520.469	0	paket	-	0	paket	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	81.479.040	4	paket	77.262.700	100	paket	95%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	laporan	10.367.210	1	laporan	3.846.500	50	laporan	37%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja Tribulan I Tahun 2023 Pada			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tribulan I Tahun 2023		
			4		5	6					
1	2	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	laporan	72.166.000	8	laporan	5.824.400	18	laporan	8%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	%	623.910.000	25	0	150.226.755	25	%	24%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	laporan	240.000	3	%	26.000	25	laporan	11%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	116.850.000	3	laporan	25.806.575	25	laporan	22%
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	506.820.000	3	laporan	124.394.180	25	laporan	25%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100	%	581.958.406	21	laporan	116.179.184	21	%	20%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	unit	557.858.406	6	%	105.279.184	18	unit	19%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	unit	24.100.000	2	unit	10.900.000	40	unit	45%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tribulan I Tahun 2023 Pada			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tribulan I Tahun 2023			
			4		5			6			
1	2	4	K		K			K			
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	Rp	47	unit	Rp	47	%	Rp
					10.657.462.963			976.342.000			9%
	Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum	100	%	5.527.628.144	47	%	930.442.000	47	%	17%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100	kasus	429.456.000	21	kasus	102.000.000	21	kasus	24%
	Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	150	kasus	3.193.585.644	35	kasus	275.400.000	23	kasus	9%
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	dokumen	518.225.000	3	dokumen	201.488.000	25	dokumen	39%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja Tribulan I Tahun 2023 Pada			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tribulan I Tahun 2023		
			4		5	6					
1	2	4	K		Rp	K		Rp	K		Rp
	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	dokumen	110.180.500	3	dokumen	-	25	dokumen	0%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	230	orang	204.931.000	180	dokumen	122.054.000	78	orang	60%
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam tehnik pencegahan kejahatan	12	dokumen	1.057.500.000	3	orang	229.500.000	25	dokumen	22%
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12	laporan	13.750.000	3	dokumen	-	25	laporan	0%
	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	100	%	5.129.834.819	47	laporan	45.900.000	47	%	1%
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha	12	laporan	2.488.140.366	3	%	10.200.000	25	laporan	0%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja Tribulan I Tahun 2023 Pada			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tribulan I Tahun 2023		
			4		5	6					
1	2	4	K		Rp	K		Rp	K		Rp
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	laporan	50.034.000	3	laporan	5.100.000	25	laporan	10%
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	laporan	2.591.660.453	3	laporan	30.600.000	25	laporan	1%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100	%	750.404.252	34	laporan	189.932.000	34	%	25%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	100	%	694.330.995	100	%	189.932.000	100	%	27%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	laporan	503.313.000	3	laporan	106.500.000	25	laporan	21%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja Tribulan I Tahun 2023 Pada			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tribulan I Tahun 2023		
			4		Rp	5		K	Rp	6	
1	2	4	K		Rp	K		Rp	K		Rp
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4	unit	86.826.025	0	laporan	-	0	unit	0%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	40	orang	104.191.970	40	unit	83.432.000	100	orang	80%
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	100	%	25.842.357	0	orang	-	0	%	0%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	20	desa/kelurahan	25.842.357	0	%	-	0	desa/kelurahan	0%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100	%	30.230.900	25	desa/kelurahan	-	25	%	0%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12	laporan	30.230.900	3	%	-	25	laporan	0%

Tabel.38
Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi								
			2021		2022		2023		2021		2022		2023				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota DAU	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100	%	6.001.101.418							100	%	5.871.515.461			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	6.646.500							100	%	6.646.500			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Jenis	3.280.500							3	Jenis	3.280.500			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	3	Dok	3.366.000							3	Dok	3.366.000			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	4.103.565.053							100	%	4.081.927.027			
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani Gaji dan Tunjangan	48	orang	4.039.627.561							48	orang	4.017.990.535			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Fasilitasi Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	3	orang	53.830.492							3	orang	53.830.492			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	6	Jenis	2.232.000							6	jenis	2.232.000			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi									
			2021		2022		2023		2021		2022		2023					
			K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18	Dok	7.875.000						18	Jenis Dok	7.874.000					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100	%	283.304.000						100	%	183.679.310					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Yang diadakan	460	stel	280.324.000						230	stel	180.699.310					
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Terdata dalam Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	%	2.980.000						100	%	2.980.000					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	100	%	261.909.200						100	%	261.573.305					
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan yang disediakan	25	Jenis	16.070.890						25	jenis	16.070.890					
	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	76	Jenis	141.298.050						76	jenis	141.015.570					
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Barang Yang disediakan	10	unit	54.171.260						10	unit	54.170.600					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang disediakan	5	Jenis	3.600.000						5	jenis	3.600.000					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rakor SKPD	100	kali	46.769.000						45	kali	46.716.245					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	300.062.555						100	%	294.996.650					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi							
			2021		2022		2023		2021		2022		2023			
			K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Mebel Yang Disediakan	16	Jenis 224.255.570						16	Jenis 223.943.500					
		Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	30	Jenis						35	Jenis -					
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Gedung Kantor / Bangunan lain yang dibangun	1	Jenis 75.806.985						1	Jenis 71.053.150					
	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100	% 475.888.080						100	% 473.096.008					
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Fasilitas Jasa Surat Menyurat	1000	lembar 13.356.000						9817	Lembar 13.356.000					
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar	48	rekoning 66.562.080						48	Rek 65.071.458					
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas Jasa Pelayanan Umum Kantor	180	orang 395.970.000						178	orang 394.668.550					
		Jumlah Fasilitas Kebersihan Kantor	2	orang						2	orang -					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100	% 569.726.030						100	% 569.596.661					
	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara	54	unit 516.325.500						31	Unit 516.320.161					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara	50	jenis 25.800.000						44	Jenis 25.800.000					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi										
			2021		2022		2023		2021		2022		2023						
			K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Yang dipelihara	3	unit	27.600.530							2	-	27.476.500					
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.Persentase peningkatan Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban umum	80	%	5.861.594.000							80,33	%	5.828.379.350					
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	2.Persentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum	100	%	5.438.949.000							100	%	5.408.694.000					
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli,Pengamanan, dan Pengawalan	3.Jumlah Patroli dan Penertiban Ketentraman dan Ketertiban Umum	70	kali	340.425.000							335	kali	340.358.000					
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penindakan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	35	%	1.935.950.000							46	%	1.911.444.000					
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	1.1).Jumlah Saran Wilayah Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	205	Des/kel	288.021.250							205	Des/kel	287.588.000					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi									
			2021		2022		2023		2021		2022		2023					
			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		2).Jumlah Anggota Linmas Yang dibina	471	anggota								700	anggota	-				
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2).Persentase Kelompok Siskamling Yang Aktif	25	%	21.862.500							25	%	21.600.500				
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3.1).Jumlah SDM Satpol PP yang Dibina	170	orang	14.645.000							170	orang	14.645.000				
		2).Jumlah Anggota Satlinmas Yang Dibina	10	orang								10	orang	-				
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Lembaga dan Kementrian Yang Menjalin Kerjasama	5	lembaga	2.838.045.250							5	lembaga	2.833.058.500				
	Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang ditegakkan	100	%	422.645.000							100	%	419.685.350				
	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang disosialisasikan	12	Perda / Perbub	179.417.000							12	Perda / Perbub	179.327.000				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi										
			2021		2022		2023		2021		2022		2023						
			K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Pengawasan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Peraturan Daerah Yang Diawasi	568	Perda / Perbub	46.394.750							568	Perda / Perbub	45.966.750					
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda / Perkada yang tertangani	20	kasus	196.833.250							112	kasus	194.391.600					
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di wilayah Kabupten	100	%	605.946.860							100	%	605.116.500					
	Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Penanganan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah	50	%	602.246.860							100	%	601.516.500					
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Oleh Bidang Pemadam Kebakaran	36	kali	523.528.000							49	kali	523.359.000					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang disediakan	10	unit	78.718.860							12	unit	78.157.500					
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	60	kali	3.700.000							114	kali	3.600.000					
	Pendataan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam	60	unit	3.700.00														

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi									
			2021		2022		2023		2021		2022		2023					
			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Proteksi Kebakaran	Kebakaran yang didata		t	0													
	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																2.292.789.823	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota DAU	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran			100	%	5.255.247.102	100	%	5.545.947.133			100	%	#		1.126.515.823	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			100	%	1.754.000	100	%	13.736.000			100	%	#		720.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3	dokumen	884.000	3	dokumen	12.140.000			3	dokumen	#	1	dokumen	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5	laporan	870.000	5	laporan	1.596.000			5	laporan	#	1	laporan	720.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	%	4.116.109.613	100	%	4.151.810.008			100	%	#	21	%	772.456.284
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12	orang/bulan	4.076.765.613	12	orang/bulan	4.081.650.008			12	orang/bulan	#		orang/bulan	761.129.284
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	dokumen	35.309.000	12	dokumen	65.776.000			12	dokumen	#		dokumen	11.327.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi									
			2021		2022		2023		2021		2022		2023					
			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5	laporan	2.175.000	5	laporan	2.600.000			5	laporan	#		laporan	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			18	laporan	1.860.000	18	laporan	1.784.000			18	laporan	#		laporan	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Falisitas Administrasi Umum PD			100	%	155.820.259	100	%	174.532.719			100	%	#	17	%	86.933.600
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			25	paket	7.067.280	25	paket	10.520.469			25	paket	#	0	paket	-
	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4	paket	42.587.259	4	paket	81.479.040			4	paket	#	4	paket	77.262.700
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			2	paket	11.996.820	2	paket	10.367.210			2	paket	#	1	paket	3.846.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			45	laporan	44.230.000	45	laporan	72.166.000			45	laporan	#	8	laporan	5.824.400
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya						49.938.900											

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi									
			2021		2022		2023		2021		2022		2023					
			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor			100	%	600.346.000	100	%	623.910.000			100	%	623.910.000	25	%	150.226.755
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat								240.000						3	0	26.000
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	laporan	108.850.000	12	laporan	116.850.000			12	laporan	116.850.000	3	laporan	25.806.575
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	laporan	491.496.000	12	laporan	506.820.000			12	laporan	506.820.000	3	laporan	124.394.180
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Fasilitas Pemeliharaan BMD			100	%	381.217.230	100	%	581.958.406			100	%	581.958.406		%	116.179.184
	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			33	unit	368.817.230	33	unit	557.858.406			33	unit	557.858.406	6	unit	105.279.184
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5	unit	12.400.000	5	unit	24.100.000			5	unit	24.100.000	2	unit	10.900.000
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.Persentase peningkatan Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban umum			85	%		85	%	10.657.462.963			100	%	10.657.462.963	47	%	976.342.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi								
			2021		2022		2023		2021		2022		2023				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	2.Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100	%	4.127.564.000	100	%	5.527.628.144					100	%	930.442.000
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli,Pengamanan,dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			365	kasus	1.693.240.000	365	kasus	429.456.000			365	kasus			102.000.000
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			476	kasus	1.179.000.000	476	kasus	3.193.585.644			476	kasus			275.400.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			12	dokumen	313.300.000	12	dokumen	518.225.000			12	dokumen			201.488.000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								110.180.500					3	0	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi									
			2021		2022		2023		2021		2022		2023					
			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							204.93 1.000					1 8 0	0	122. 054. 000		
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			12	doku men	942.024.00 0	12	doku men	1.057. 500.00 0			1 2	doku men	# #	3	doku men	229. 500. 000
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani							13.750 .000							3	0	-
	Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang ditegakkan			100	%	2.779.635. 574	100	%	5.129.83 4.819			8 9	%	#	4 7	%	45.900 .000
	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha			12	lapor an	1.328.381.5 00	12	lapor an	2.488. 140.36 6			1 2	lapor an	# #	3	lapor an	10.2 00.0 00
	Pengawasan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12	lapor an	44.800.000	12	lapor an	50.034 .000			1 2	lapor an	# #	3	lapor an	5.10 0.00 0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi								
			2021		2022		2023		2021		2022		2023				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			12	laporan	1.406.454.074	12	laporan	2.591.660.453			12	laporan	3	laporan	30.600.000
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di wilayah Kabupten			100	%	540.831.530	100	%	750.404.252			100	%	34	%	189.932.000
	Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Penanganan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Daerah			100	%	540.831.530	100	%	694.330.995			100	%		%	189.932.000
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			12	laporan	469.655.000	12	laporan	503.313.000			12	laporan	3	laporan	106.500.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			4	unit	71.176.530	4	unit	86.826.025			4	unit	0	unit	-
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			40	orang		40	orang	104.191.970					40	orang	83.432.000

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Triwulan I Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar 79,12 %, dengan capaian kinerja sebesar 95,32%
2. Capaian Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja triwulan I Tahun 2023 terdiri atas 1 sasaran yakni Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dari sasaran tersebut terdapat 2 indikator yakni:
 - a. Persentase Penegakan Perda/Perkada dengan target 100% dengan realisasi sebesar 83 realisasi sebesar 81% dengan capaian kinerja sebesar 95,29%.
 - b. Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) dengan target 75% sedangkan realisasinya sebesar 82% dengan capaian 109,2%
3. uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang menunjukkan keberhasilan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya menindaklanjuti indicator yang masih dipandang kurang berhasil upaya yang dilakukan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kembali indikator dan target pada sasaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang di dalam Matrik Renstra OPD tahun 2018-2023 yang nantinya dijadikan sebagai bahan reuiu Rentra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

2. Mengoptimalkan Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat terhadap produk Hukum Daerah
3. Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga terkait dalam hal meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Demikian laporan kinerja ini disampaikan sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023 sampai dengan Tribulan I Tahun 2023

Lumajang, 31 Maret 2023

Plt. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



SUKAFDI, MP.

NIK. 19651201 198903 1 012